

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

## BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
NTB  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
2025**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja BRMP NTB Triwulan I TA. 2025 dapat kami selesaikan. BRMP sebagai salah satu UPT Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi perakitan di bidang pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, BRMP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BRMP NTB pada Triwulan I TA. 2025, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian LAKIN ini. Disadari bahwa LAKIN ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritikan untuk penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Namun demikian, diharapkan semoga LAKIN ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi penyelenggara kinerja BRMP NTB pada masa yang akan datang.

Mataram, Maret 2025

Kepala Balai,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi  
NIP. 19671114 199803 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BRMP .....	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja .....	3
1.4. Sumberdaya Manusia .....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi .....	11
2.2. Misi .....	11
2.3. Tujuan .....	12
2.4. Kegiatan .....	12
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 .....	20
3.2. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi .....	28
3.3. Capaian Kinerja Lainnya .....	29
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	30
IV. PENUTUP .....	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.	Perkembangan PNS BRMP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2021-2025).....	8
Tabel 2.	Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 BRMP NTB (2021 – 2025).....	9
Tabel 3.	Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BRMP NTB (2024 - 2025).....	10
Tabel 4.	Rencana Kinerja BRMP NTB Tahun 2025 .....	15
Tabel 5.	Penetapan Kinerja BRMP NTB Tahun 2025 .....	17
Tabel 6.	Tingkat Capaian Kinerja BRMP NTB Tahun 2025 .....	20
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja BRMP NTB Tahun 2025 .....	23
Tabel 8.	Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BRMP NTB Tahun 2025 ....	29
Tabel 9.	Revisi Anggaran Kegiatan BRMP NTB TA 2025 .....	31

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gbr.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Gbr 1.	Bagan Struktur Organisasi BRMP NTB.....	4
Gbr 2	QR code kontak aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BRMP NTB .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai perundangan-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, maka BRMP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memuat kinerja BRMP NTB pada TA. 2025, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai salah satu organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian, dalam era globalisasi pembangunan pertanian yang dinamis membutuhkan adanya inovasi. Sebagai lembaga penghasil dan penerap standar instrumen pertanian BRMP NTB juga dituntut untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diamanatkan.

Sebagian besar kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dilaksanakan secara langsung oleh petani di bawah bimbingan fungsional dan penyuluh pertanian. Dengan demikian, program-program tersebut harus disesuaikan dan mudah dikerjakan petani dan penerap standar lainnya.

Sumber yang bersifat "*top-down*" dihasilkan dari institusi/lembaga

pengujian estándar dan pusat-pusat standar. Sumber teknologi “*bottom-up*” merupakan teknologi yang berasal dari petani berupa teknologi-teknologi konvensional, tradisional, berupa “*indigeneous technology*” atau lembaga-lembaga penghasil standar. Kedua sumber teknologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian perlu strategi khusus dalam meramu dan merakit teknologi dari kedua sumber tersebut secara lebih tepat.

Untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi tersebut di atas perlu mengakomodir kebutuhan daerah yang merupakan mitra kerja utama dari BPSIP NTB, yang tercermin dalam Rencana Strategis Pemerintah Propinsi NTB, dalam hal ini melalui Dinas Teknis terkait (pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan), juga harus mempertimbangkan Rencana Strategis instansi vertikalnya (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Rencana Aksi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian) serta Rencana Operasional BRMP NTB sendiri.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, BRMP NTB dilengkapi dengan perangkat organisasi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B-450.2/OT.040/H.12.18/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 . Dengan perangkat organisasi ini diharapkan BRMP NTB dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yang tertuang di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

### 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP

Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang berada di daerah. Secara administratif berada dalam koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

BRMP mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi Perakitan dan Modernisasi pertanian. Tugas BRMP adalah (1) **Penyusunan kebijakan teknis:** Merumuskan rencana dan program, serta kebijakan terkait perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penerapan teknologi pertanian modern. (2) **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan:** Melakukan pengawasan, analisis, penilaian, dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan

perakitan dan modernisasi pertanian. (3) **Administrasi badan:** Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga badan.

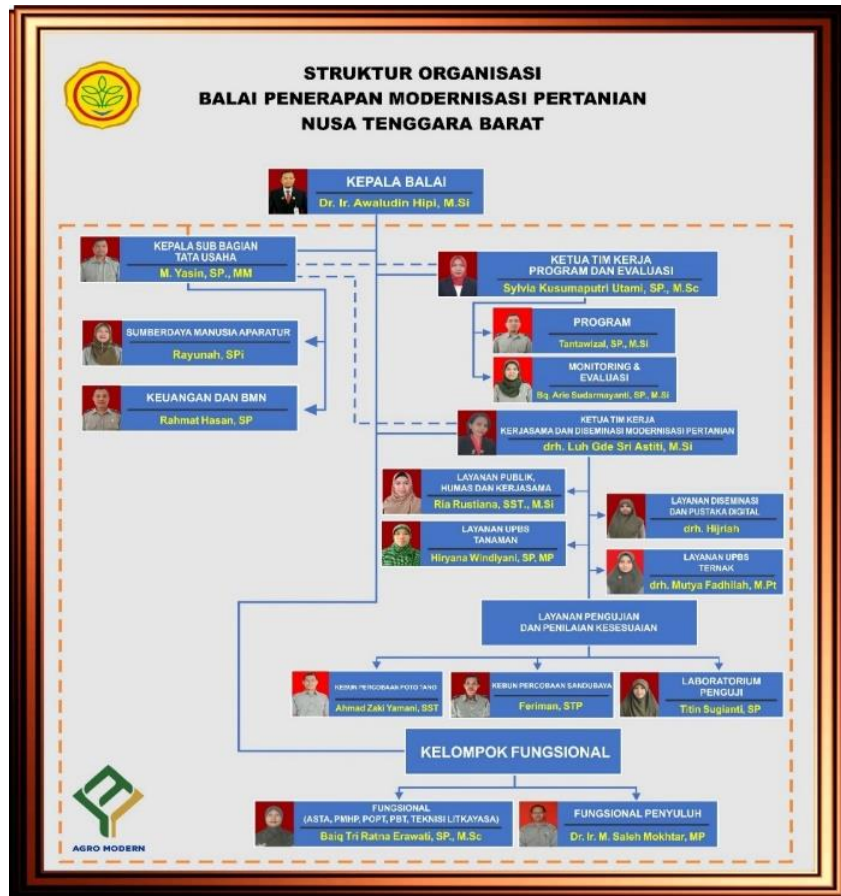
(4) **Pelaksanaan fungsi lain:** Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Sedangkan fungsi BRMP adalah (1) **Perekayasaan dan Perakitan:** Mengembangkan dan merakit teknologi pertanian baru yang inovatif. (2) **Pengujian:** Melakukan pengujian terhadap teknologi yang dikembangkan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. (3) **Penyebarluasan:** Menyebarluaskan informasi dan hasil penelitian kepada petani dan pihak terkait. (4) **Penerapan:** Menerapkan teknologi pertanian modern di lapangan melalui berbagai program dan kegiatan. (4) **Modernisasi Pertanian:** Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan modernisasi pertanian di berbagai sektor. BRMP berperan penting dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian untuk mencapai modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan ketahanan pangan nasional.

### 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BRMP NTB dibentuk berdasarkan Permentan No 10 tahun 2025. BRMP NTB secara langsung berada dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kementerian Pertanian.

BRMP NTB dipimpin oleh seorang Kepala Balai setingkat Eselon IIIA, dibantu oleh 1 unit struktural setingkat Eselon IVA, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, serta dibantu 2 Ketua Tim Kerja (Katimker) yaitu Katimker Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Katimker Program dan Evaluasi. Selain itu, dalam memudahkan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan Balai, BRMP NTB juga didukung oleh Kelompok Fungsional yaitu Kelompok Fungsional ASTA, PMHP, POPT, Kelompok Penyuluh, PBT, Arsiparis, Pustakawan, Keuangan dan kelompok fungsional lainnya.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BRMP NTB TA 2025

Untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi dan mengakomodasikan berbagai kegiatan strategis, maka dibentuk unit-unit kelembagaan internal BRMP NTB dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang SOTK. Pembentukan unit kelembagaan internal BRMP NTB bertujuan menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh pejabat dan staf, sehingga tugas dan fungsi BRMP NTB dapat berjalan lancar dan mencapai kinerja yang optimal. Pada TA. 2025 telah ditetapkan Struktur Organisasi, Personalia serta Uraian Tugas dan Tanggungjawab Personalia BRMP NTB, sesuai SK Kepala BRMP NTB Nomor B-450/OT.040/H.12.18/05/2025 seperti disajikan pada Gambar 1.

Dalam SK tersebut dibentuk Katimker Program dan Evaluasi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan kinerja BRMP NTB. Unit Program dan evaluasi dipimpin oleh seorang Katimker Program dan Evaluasi. Demikian pula kelembagaan fungsional lainnya yang dipimpin oleh seorang Ketua fungsional. Sedangkan kelompok fungsional penyuluh pertanian dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian.

#### **1.4. Sumberdaya Manusia**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian khususnya BRMP NTB berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumberdaya manusia.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, BRMP NTB telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mulai tanggal 27 September 2010 dan terakhir diperbaharui sesuai standar ISO 9001:2015 pada 26 September 2019. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki standard performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, konsisten dan komitmen terhadap mutu pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Dalam memenuhi hal tersebut, BRMP NTB memerlukan sistem manajemen mutu dalam bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholders.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja, salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Pelaksanaan disiplin bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Secara rinci komitmen Kementerian Pertanian terhadap reformasi dan komitmen terhadap PP 53 tahun 2010 lebih detail disusun dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Pada intinya PNS sebagai abdi Negara diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi dan anti KKN. Dengan budaya kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif serta sumber daya PNS yang kompeten maka diharapkan dapat memberikan korelasi positif terhadap pelayanan publik yang bersifat *acceptable, applicable, dan accountable* yang pada akhirnya dapat menciptakan good and clean governance sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Selain hal tersebut prinsip pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dalam Permentan No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 menjelaskan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (obyektif, transparan, institusional), partisipatif (melibatkan berbagai pihak terkait), berorientasi pembinaan (perbaikan sistem, metode, perilaku), mengutamakan pendekatan reward dan punishment yang bersifat edukatif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) BRMP NTB pada awal tahun 2025 sebanyak 84 orang dan pada tahun 2025 terdapat sampai Triwulan I terdapat 2 orang memasuki masa purna tugas an : Hariani dan Sabar Untung, SP.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, PNS BRMP NTB berpendidikan mulai SLTP hingga S3. PNS yang berpendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 20 orang, D3 sebanyak 4 orang, D4 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 33 orang, S2 sebanyak 20 orang, dan S3 sebanyak 5 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar di dalam negeri pada tahun 2025 sudah tidak ada.

PNS BRMP NTB yang sedang mengikuti pendidikan pendidikan S1 dengan izin belajar di universitas Alazhar Mataram sebanyak 1 (satu) orang an. Slamet Nugroho, A.Md.

Perkembangan PNS BRMP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan PNS BRMP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2021 – 2025)

No	Tahun	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3/D4	SLTA	SLTP	SD	
1	2021	9	15	38	5	28	4	-	99
2	2022	9	18	33	5	25	3	-	93
3	2023	3	15	30	4	22	3	-	77
4	2024	5	19	20	3	17	2	-	66
5	2025	5	20	33	4	20	2	-	84

Sumber : Data Simprog BRMP NTB

Tabel 1. memperlihatkan bahwa dominasi PNS BRMP NTB berpendidikan S3 (36.20%), S2 (103.57%), S1 (183.3%), D4 (2.38%), D3 (4.76%), SLTA (133.33%), SLTP (16.66%)

Sampai Triwulan I Tahun 2025, PNS BRMP NTB berdasarkan jabatannya terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat struktural sebanyak 2 orang terdiri atas Kepala Balai (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVa). Jumlah tenaga fungsional 44 (empat puluh empat) orang terdiri dari analis standardisasi sebanyak 12 orang, 3 orang calon analis standarisasi (CPNS th 2025), 2 (dua) orang analis standardisasi Pertama, 5 (lima) orang analis standardisasi Muda dan 2 orang analis standardisasi Madya. Jumlah Penyuluh sebanyak 21 orang, terdiri atas 2 (dua) orang Penyuluh Pertanian Pertama, 15 (enam belas) orang Penyuluh Pertanian Muda dan 4 (empat) orang Penyuluh Pertanian Madya. Fungsional tertentu lainnya: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 2 (dua) orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3 (tiga) orang diantaranya Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda 1

(satu) orang dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama 2 (dua orang), Pengawas Benih Tanaman Terampil 2 (dua) orang, Arsiparis 2 orang diantaranya 1 (satu) orang arsiparis muda dan 1 (satu) orang arsiparis pertama, Pustakawan Ahli Muda 1 orang, Teknisi Litkayasa 1 (satu) orang, analis keuangan 1 (satu) orang dan pranata computer 1 (satu) orang. Perkembangan jabatan fungsional tertentu BRMP NTB (2019-2023) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 BRMP NTB (2021 – 2025)

No	Jabatan Fungsional	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Peneliti	28	28	-	-	-
2	Analisis Standardisasi (ASTA)	-	-	-	9	12
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	-	-	-	2	3
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	-	-	-	3	3
5	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	-	-	-	2	3
6	Penyuluh	19	19	19	22	21
7	Pustakawan	1	1	-	1	1
8	Arsiparis	2	2	2	2	2
9	Litkayasa	1	1	1	1	1
10	Analisis Keuangan	-	2	1	1	1
11	Pranata Komputer	-	-	-	1	1
	Total	51	53	23	47	48

**Sumber : Data Simprog BRMP NTB**

Berdasarkan tabel tersebut diatas terjadi perubahan jumlah fungsional di Penyuluh dari 22 di tahun 2024 menjadi 21 orang di tahun 2025 dan PMHP dari tahun 2024 sebanyak 2 menjadi 3, dan fungsional PBT di th 2024 sebanyak 2 orang dan th 2025 sebanyak 3 orang. Berkurangnya jumlah penyuluh dari 22 orang menjadi 21 orang dikarenakan adanya 1 orang penyuluh mendapatkan tugas belajar, namun belum aktif kembali menjadi penyuluh. Sedangkan, bertambahnya fungsional PMHP dan PBT dikarenakan adanya tambahan PPPK.

Tabel 3. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BRMP NTB (2024 – 2025)

No	Jabatan Fungsional	Tahun		Keterangan
		2024	Triwulan I 2025	
1	Penyuluh	22	21	
2	Pustakawan	1	1	
3	Analisis Standardisasi	12	12	
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	3	
5	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	3	
6	Pengawas Benih Tanaman	2	3	
7	Arsiparis	2	2	
8	Analisis Keuangan	1	1	
9	Litkayasa terampil	1	1	
10	Pranata computer	1	1	
	<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi

Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon III BRMP yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit BSIP melalui koordinasi BB Penerapan. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BRMP NTB menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan , yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Strategis BRMP NTB. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BSIP menjadi acuan visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk BRMP NTB. Memperhatikan hierarchical strategic plan, maka visi, misi, tujuan dan sasaran BRMP NTB, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program-program kegiatan Tahun 2025, maka visi BRMP NTB kedepan adalah :

“ Menjadi lembaga perakitan dan modernisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian “

### 2.2. Misi

Sedangkan misi BRMP NTB untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

### 2.3. Tujuan

Berdasarkan visi, misi balai pada program penerapan yang tertuang dalam Renstra BRMP NTB, bertujuan:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BRMP yang akuntabel.

### 2.4. Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BRMP NTB menganut beberapa tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di BRMP NTB. Tata nilai tersebut antara lain:

1. BRMP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan Fast learning organization.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagiandari upaya mewujudkan corporate management yang baik.
4. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari implementasi program-program penerapan dan diseminasi standar yang tertuang dalam Renstra BRMP NTB adalah:

1. Dimanfatkannya standar bidang pertanian dan pengembangan teknologi terstandar pertanian spesifik lokasi
2. Meningkatnya kualitas layanan publik BRMP NTB.

Sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di daerah, BRMP NTB banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, baik lokal, regional, maupun nasional, dan bahkan internasional, mengingat makin canggihnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa isu strategis yang terkait dengan tupoksi dan mandat BRMP NTB antara lain adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan nasional dan daerah, percepatan dan perluasan adopsi, kemasan hasil pengkajian untuk penyusunan kebijakan, biaya input relatif mahal, akses benih, perubahan iklim, ketahanan pangan di lahan marginal
2. Diseminasi hasil litkaji pertanian yang belum efektif, rendahnya nilai tukar petani, dan pengentasan kemiskinan.
3. Era otonomi daerah memberikan peluang kabupaten/kota menentukan sendiri program prioritas dan kebijakan-kebijakan, termasuk di sektor pertanian, memerlukan sinergi program yang lebih baik.
4. Dinamika masyarakat di daerah dan makin canggihnya komunikasi dan arus informasi membuka peluang makin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan teknologi pertanian.

Isu-isu strategis di atas membuka peluang, tantangan, dan bahkan mungkin juga ancaman untuk pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar yang menjadi mandat BRMP. Peluang, tantangan dan ancaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang amat penting bagi BRMP dengan stakeholder, terutama Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi wahana kerjasama dan integrasi program pembangunan pertanian supaya lebih efisien, efektif, dan terarah.
2. Kebutuhan teknologi di wilayah kerja BRMP NTB harus didasarkan atas kebijakan nasional, daerah, dan kebutuhan pengguna teknologi (petani, dunia usaha, dan masyarakat luas).
3. Dinamika global, regional, dan lokal menuntut penyediaan teknologi yang lebih tepat.

4. Kerjasama dengan swasta dan luar negeri menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan pendanaan APBN yang terbatas, alternatifnya dengan sharing budget.

Berdasarkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, strategi utama yang ditempuh oleh BRMP NTB untuk melaksanakan tupoksinya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana penerapan standar dan diseminasi standar.
2. Mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif untuk menghasilkan inovasi pertanian yang bermutu dan berdaya saing.
3. Mengembangkan sistem standardisasi berorientasi pada dampak untuk pembangunan pertanian (*Managing research's impacts for Agricultural Development*).
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan *core businesses* (Keunggulan) BRMP NTB.
5. Membangun dan meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta, Luar Negeri, maupun pihak lain dalam rangka menggalang pendanaan.
6. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam kegiatan penerapan dan memasivkan diseminasi standar bidang pertanian.
7. Meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pusat/BB/Balai pengujian standar nasional.
8. Menajamkan prioritas kegiatan dalam rangka efisiensi, efektifitas, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan.
9. Membangun dan mengembangkan sistem kompetisi dalam penetapan proposal kegiatan.

Mengacu pada kebijakan umum penerapan dan diseminasi standar bidang pertanian yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2021 – 2025, maka BRMP NTB menetapkan kebijakan pertanian sebagai berikut :

1. Peningkatan fokus kegiatan dan capaian hasil perakitan berorientasi pasar/ referensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah
2. Peningkatan kuantitas/ kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian
3. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan inovasi pertanian
4. Peningkatan efektivitas manajemen institusi
5. Peningkatan kapabilitas manajemen untuk memperluas jejaring kerjasama.

## 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### 2.5.1. Rencana Kinerja Tahun 2025

Sebagai lembaga perakitan modernisasi dan diseminasi pertanian, pada tahun anggaran 2023, BRMP NTB telah mengusulkan beberapa kegiatan penerapan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Perencanaan kegiatan Tahun 2025 tersebut mengacu pada RENSTRA BRMP dan BB Penerapan dan Pengembangan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Adapun rencana kinerja BRMP NTB Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Rencana Kinerja BRMP NTB 2025

No	Sasaran Target	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	126

3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	85

Total pagu kegiatan TA 2025 sebesar Rp. 19.131.695.000,-. Terdapat blokir anggaran (Automatic Adjustment) pada kegiatan Program Dukungan Manajemen dan blokir PNPB senilai Rp. 530.624.000,- atau 3% dari total anggaran.

### 2.5.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BRMP NTB dan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2025, BRMP NTB telah mengimplementasikan program penerapan dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan-kegiatannya sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditargetkan. Adapun penetapan kinerja tersebut secara rinci disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penetapan Kinerja BRMP NTB Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1

	Instrumen Pertanian	2. Jumlah lembagayang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	126
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa tenggara Barat (Nilai)	85

Perencanaan kegiatan tersebut kemudian dicapai melalui beberapa judul kegiatan diseminasi serta manajemen yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **2.5.3. Indikator Keberhasilan Capaian Kinerja**

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BRMP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input yang digunakan oleh BRMP NTB meliputi antara lain dana, sumberdaya manusia (SDM) atau fungsional yang melaksanakan kegiatan.
- b. Keluaran (output) adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BRMP NTB umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, pesyaratan teknis minimal, maupun rancangan SNI dan revisi SNI yang akan disampaikan pada stakeholder (BRMP, BB Penerapan, Lembaga/Instansi terkait dan penerap perakitan).
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari masing-masing dari masing-masing kegiatan BSIP bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan diseminasi yang dihasilkan oleh BRMP NTB umumnya dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan maupun stakeholder lainnya.
- d. Manfaat adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja BRMP NTB pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan persetujuan Kepala Badan Standar Instrumen Pertanian, bahwasanya ada 4 (empat) sasaran utama yang akan dicapai oleh Balai. Sasaran utama ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 (Lima) indikator kinerja.

**1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025**

BRMP NTB mengacu pada Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan BB Pengembangan Penerapan Perakitan dan Modernisasi tahun 2021 – 2025, dalam menetapkan standar kinerja pada awal Tahun 2025. Standar kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BRMP NTB yang telah ditandatangani oleh Kepala BRMP.

Sejalan dengan perjalanan waktu, terdapat revisi Perjanjian Kinerja (PK) BRMP NTB terkait dengan anggaran kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan sasaran strategis, Indikator Kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2025.

Penilaian evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, selain itu juga akan melihat permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi standar yang telah ditargetkan. Mempelajari capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun 2025 dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kinerja Balai, dengan harapan terjadi peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Rincian tingkat pencapaian kinerja BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025 dari masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar dihasilkan	Produksi Pertanian yang	126
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)		80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)		80

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu acuan standar kinerja Balai dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya. Dengan demikian hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mampu memberi gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan BRMP NTB di Tahun 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2025, maka digunakan scoring yang mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian kinerja >100%); 2) berhasil (capaian kinerja 80% - 100%); 3) cukup berhasil (capaian kinerja 60% - <80%); dan 4) kurang berhasil (capaian kinerja <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan Balai.

Indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja bersumber dari dua jenis indikator yaitu indikator proses/aktivitas (lead indikator) dan indikator output/outcome (lag indikator). Indikator proses/aktivitas (lead indikator), merupakan indikator yang pencapaiannya ada dibawah kendali organisasi/Balai. Sedangkan indikator output/outcome (lag indikator) merupakan indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi/Balai. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dimana pada jenjang eselon I dan eselon II menggunakan jenis indikator outcome/output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja BSIP menggunakan lag indikator.

Berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan IKU dalam perjanjian kinerja, maka dari 3 (tiga) sasaran strategis Balai kemudian diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja output berupa : (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian

Terstandar yang dihasilkan (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian NTB (Nilai), dan (5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai). Berdasarkan analisis dan pengukuran kinerja data hasil capaian kinerja BRMP NTB Triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	1	
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar dihasilkan	Produksi Pertanian yang	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82	

4	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	85
---	---	--	----

Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 masih terdapat blokir anggaran sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan. Secara umum tingkat capaian kinerja BPSIP NTB Triwulan I TA. 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan balai sebagian telah dilaksanakan.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 2 indikator kinerja yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI), dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

### Indikator Kinerja 1

Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI),

Standar Instrumen pertanian yang didiseminasikan merupakan standar instrument yang sudah memiliki SNI.

### Indikator Kinerja 2

Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Hasil penerapan (output akhir) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) adalah berapa lembaga yang menerapkan Standar Instrumen pertanian. Terkait dengan hal tersebut, maka output Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) dicapai melalui kegiatan loan dari Bank Dunia yaitu Icare yang saat ini masih dilaksanakan dan mengalami blokir.

### Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan.

### Indikator Kinerja 1

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan pada tahun ini targetnya sebesar 126 yang akan dicapai melalui komoditas Padi.

### Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### Indikator Kinerja 1

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)

Indikator ini merupakan indikator untuk mendukung sasaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Penilaian dikategorikan menjadi dua, yaitu 1) untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal; 2) untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB.

Tahun 2025 indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas pada

satker BRMP NTB adalah 80. Indikator ini belum tercapai pada triwulan I tahun 2025 karena belum dilakukan penilaian.

### Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran kinerja ini tercapai melalui 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

### Indikator Kinerja 1

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran dalam hal ini BRMP NTB yang tertuang dalam bentuk dokumen anggaran dan digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Target Indikator kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 2025 adalah 85 yang akan dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Dari hasil entry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai pada aplikasi yang juga disesuaikan dengan realisasi penarikan anggaran, maka nilai kinerja ini akan secara otomatis tercetak pada aplikasi SMART pada akhir tahun anggaran. Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ini masih ada blokir anggaran, dan kegiatan yang tidak diblokir anggarannya tetap melaksanakan kegiatan.

## 1.2 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi

### Keberhasilan

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Balai sesuai Renstra 2021-2025. Keberhasilan capaian kinerja pada 5 tahun pelaksanaan Renstra sebelumnya tidak terlepas dari dukungan program dan dukungan anggaran kegiatan yang tertuang dalam DIPA Balai. Demikian pula pada pelaksanaan tahun 2025, keberhasilan capaian kinerja didukung pula oleh: 1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan; 2) Terjalannya komunikasi yang intensif dari masing-masing penanggungjawab terhadap capaian kerjanya; 3) Dukungan dan kerjasama dengan substansi teknis dari Pemda dan jajarannya; serta 4) Dukungan, partisipatif petani/peternak sebagai pengguna inovasi teknologi.

### Masalah dan Kendala

Kinerja kegiatan di BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada kegiatan yang tidak mengalami blokir anggaran. Namun demikian masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu :  
Masih terdapat blokir anggaran senilai Rp. 530.624.000,- (3%) dari pagu anggaran Balai yaitu Rp 19.131.695.000,-

1. PNPB dan ICARE belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya pemblokiran anggaran pada beberapa akun sampai saat ini.

### Langkah Antisipasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja adalah : 1) melakukan perbaikan rencana kegiatan yang telah disusun di awal kegiatan dan RKA-KL, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait;

Untuk kegiatan Laboratorium pengujian, kegiatan konsultasi terkait pelayanan pengujian, pengguna juga dapat menghubungi kontak customer service (CS) LP-BPSIP NTB yang memberikan layanan online melalui aplikasi Whatsapp sesuai jam kerja. QR-code CS LP-BPSIP NTB yang dapat di scan ditampilkan dalam Gambar 2. Selanjutnya, contoh

tanah/pupuk/tanaman dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman, demikian pula dengan pembayaran dapat di transfer ke rekening BRMP NTB.



Gambar 2. QR code kontak Aplikasi Android Whatsapp untuk kontak CS LP-BRMP NTB  
<https://wa.me/qr/GM4A3UX6PCP4J1>

### 1.3 Capaian Kinerja Lainnya

#### Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja balai pada Triwulan I tahun 2025 dinilai berdasarkan target capaian output dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan berdasarkan target capaian output dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Beberapa kegiatan yang tidak blokir anggarannya telah melaksanakan kegiatan sampai dengan saat ini.

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Lainnya BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja katagori
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
		1. Jumlah lembaga	

1			1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB (Nilai)	82

---

4	Terkelolan ya Anggaran Badan Standarisa si Instrumen pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	90
---	--	---	----

---

## 1.4 Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran kegiatan pengkajian, diseminasi dan manajemen Balai ditetapkan dalam DIPA BPSIP NTB. Pagu awal DIPA BRMP NTB pada TA. 2025 adalah senilai 19.131. 695.000,-.

### 1.4.1 Realisasi Keuangan

Dalam melaksanakan tupoksinya BRMP NTB pada TA 2025 mengelola Anggaran yang tertuang dalam DIPA. Berdasarkan sumber dana, secara rinci disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Anggaran BRMP NTB Berdasarkan Sumber Dana, Triwulan I TA 2025

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	APBN	9.030.818.000,-	47,20
2.	PNBP	200.877.000,-	1,04
3.	ICARE	9.900.000.000,-	51,74
Total		19.131. 695.000,-	100,0

Anggaran Satker BRMP NTB dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SP-DIPA-018.09.2.634040/2024 Tanggal 2 Desember 2024.

Total anggaran yang dikelola BRMP NTB dari sumber anggaran tersebut sebesar Rp. 19.131.695.000,-

Anggaran DIPA dari dana loan Bank dunia merupakan anggaran terbesar yaitu dana ICARE sebesar Rp. 9.900.000.000 atau 51,74%. Sedangkan anggaran kegiatan APBN pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 9.030.818.000,- atau 47,20% dan PNBP sbesar Rp. 200.877.000,- atau 1,04%.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp. 2.261.720.794,- (11,82%), rincian realisasi berdasar jenis belanja : Belanja Pegawai Rp

829.048.690,- (13.38%), Belanja Barang Operasional Rp 318.402.432,- (12.71%), Belanja Barang Non Operasional belum ada pengeluaran.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum kinerja BRMP NTB Triwulan I Tahun 2025 masih terus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut, BRMP NTB diharapkan terus melakukan kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah provinsi/kabupaten dalam setiap kegiatannya.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp. 2.261.720.794,- (11,82%), rincian realisasi berdasar jenis belanja : Belanja Pegawai Rp 829.048.690,- (13.38%), Belanja Barang Operasional Rp 318.402.432,- (12.71%), Belanja Barang Non Operasional belum ada pengeluaran.

#### 4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk menjaga capaian Balai, Manajemen BRMP NTB senantiasa berusaha menjaga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui beberapa komitmen yang disepakati bersama seluruh komponen yang ada di BRMP NTB.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan tetap dilakukan evaluasi progres capaian kegiatan setiap bulannya melalui pelaporan capaian kinerja pada masing-masing kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun pada dokumen Rencana Operasional Kegiatan

Evaluasi pada kegiatan rutin manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perkantoran, administrasi dan keuangan, serta kepegawaian berjalan sesuai dengan target kinerja. Sedangkan pada bagian kerjasama dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja balai sudah sesuai dengan

tupoksi

BRMP

NTB

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN  
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB**  
 JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT 83371 NUSA TENGGARA BARAT  
 Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620  
 WEBSITE: <https://ntb.bsp.pertanian.go.id>; E-MAIL: [bsp.ntb@pertanian.go.id](mailto:bsp.ntb@pertanian.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: <u>Awaludin Hipi</u>
Jabatan	: Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: <u>Fadjry Djufry</u>
Jabatan	: Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Jakarta, 8 Januari 2024
Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	<u>Awaludin Hipi</u>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang <u>Didiseminasikan</u> (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian <u>Terstandar</u>	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian <u>Terstandar</u> yang Dihasilkan (Unit)	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	82
4	<u>Terkelolanya</u> Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang <u>Akuntabel</u> dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>4.282.000.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	4.282.000.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>380.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian <u>Terstandar</u>	Rp	380.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>9.981.232.000</b>
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	9.981.232.000

Pihak Kedua	Mataram, 8 Januari 2024
Fadry Djufry	Pihak Pertama <u>Awaludin Hipi</u>

